

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepoloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan.

- Peraturan Daerah ini memuat :

1. Ketentuan Umum
2. Asas, Fungsi dan Tujuan
3. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah
4. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda
5. Perencanaan Kepemudaan
6. Pelayanan Kepemudaan
7. Kerjasama dan Kemitraan
8. Organisasi Kepemudaan
9. Penghargaan
10. Sarana dan Prasarana Kepemudaan
11. Data dan Informasi
12. Pendanaan
13. Pembinaan dan Pengawasan
14. Pelaporan
15. Sanksi Administratif
16. Ketentuan Peralihan
17. Penutup

CATATAN : - Peraturan Daerah terdiri dari 17 BAB dan 53 Pasal.

- Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.